

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan tidak terlepas tentang pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk dengan perkembangan akuntansi di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Pengertian laporan keuangan dapat ditemukan dari berbagai macam referensi, yaitu:

*Report that measures the success of enterprise operations for a given period of time. (Kieso, Weygant)*

*Structural Representation of the financial position of and the transaction undertaken by entity. (IPSAS)*

*Consolidated financial statements are the financial statements of an economic entity presented as those of a single entity. (IPSAS 8- Interest in Joint Ventures)*

Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna akun informasi akuntan keuangan yang lazim. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik seperti laporan tahunan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu instansi atau perusahaan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Unsur-unsur lain dari laporan keuangan selain menyediakan laporan-laporan tersebut, laporan keuangan juga menyediakan informasi meliputi aset, kewajiban, ekuitas, kinerja, penghasilan, beban, penyesuaian pemeliharaan modal, laba atau rugi perusahaan, juga arus kas.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat ditukar dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya. Aset tetap merupakan salah satu komponen perusahaan yang nilainya paling penting dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting bagi suatu instansi atau perusahaan. Dalam beberapa entitas atau referensi akuntansi lain, aset tetap umumnya direferensikan sebagai *property*, *plant*, dan *equipment* yang meliputi tanah, gedung kantor, gedung pabrik, peralatan, dan lain-lain. Pengertian aset tetap sendiri dapat ditemukan dari berbagai macam referensi, salah satunya yaitu:

*Assets are resources controlled by an entity as a result of past events and from which future economic benefits or service potential are expected to flow to the entity. (IPSAS 1- Presentation of Financial Statement)*

*Property, plant and equipment are tangible items that: (a) Are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and (b) Are expected to be used during more than one reporting period. (IPSAS 17- Property, Plant, and equipment)*

*Class of property, plant and equipment means a grouping of assets of a similar nature or function in an entity's operations that is shown as a single item for the purpose of disclosure in the financial statements. (IPSAS 17- Property, Plant, and equipment)*

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah *douane*. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah *customs*. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu kantor yang dibawah oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat (*sumber: bagian umum*).

Dasar hukum dari penyajian aset tetap dalam neraca pemerintah adalah UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ruang lingkup Perbendaharaan

Negara meliputi: (a) pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; (b) pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; (c) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; (d) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; (e) pengelolaan kas; (f) pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; (g) pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; (h) penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; (i) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; (j) penyelesaian kerugian negara/daerah; (k) pengelolaan Badan Layanan Umum; (l) perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Bagian Ketiga Asas Umum Pasal 3.

Undang-undang tersebut merupakan salah satu pedoman dalam menyusun neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan berupa aset, hutang dan kekayaan pada suatu tanggal tertentu. Salah satu komponen utama dalam neraca adalah aset tetap atau barang milik negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Tuntutan penyajian laporan keuangan negara adalah menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan pengalaman pemerintah dalam menyusun neraca, komponen aset adalah hal yang paling sulit untuk diakui, hal ini terkait dengan banyaknya jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah termasuk aset budaya atau sejarah, aset kemiliteran dan infrastruktur yang memerlukan perlakuan akuntansi yang spesifik. Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam aset tetap misalnya pengamanan atas aset tetap yang kurang. Semua permasalahan tersebut dikarenakan faktor kurangnya sumber daya manusia dalam menangani

aset. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disusunlah penelitian dan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I”**.

## **1.2. Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam tugas akhir ini maka penulis akan memberikan penjelasan judul sebagai berikut:

### **Perlakuan Akuntansi**

Suatu kegiatan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian informasi ekonomi. Untuk membuat informasi laporan keuangan yang digunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan oleh manajemen untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Aset Tetap**

Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

## **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I**

Merupakan tempat penulis melakukan penelitian Tugas Akhir. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi yang dibawah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

Bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi pemerintahan atas aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1. Bagi Mahasiswa**

Untuk memperoleh data, keterangan-keterangan serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diangkat. Membandingkan

antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi dilapangan.

### **1.5.2. Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Agar dapat menambah informasi serta pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian sehingga dapat berguna bagi mereka yang memerlukan.

### **1.5.3. Bagi Instansi**

Laporan ini dapat memberikan saran dan nilai-nilai yang bermanfaat dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam mematuhi peraturan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

## **1.6. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir yaitu sebagai berikut :

### **1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Tugas akhir ini disusun berdasarkan masalah tentang aset tetap, sehingga lingkup pembahasan hanya dibatasi pada perlakuan akuntansi aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

### **1.6.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang akan diolah, mahasiswa menggunakan metode pengumpulan data. Metode tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Wawancara**

Metode yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait dan yang berhubungan langsung dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu pada Sub Bagian Umum yaitu Bagian Humas dan Rumah Tangga serta Bagian Keuangan.

**b. Observasi**

Mahasiswa melihat dan melakukan pengamatan langsung mengenai proses kegiatan. Dengan metode ini mahasiswa dapat memperoleh data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal-hal yang diteliti.

**c. Dokumentasi**

Adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan aset tetap. Buku, literatur, dan jurnal yang ada untuk mendapatkan landasan teori dan informasi pendukung dalam pembahasan masalah.